



PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 49 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2022**





BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 143);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. (Berita Daerah Nomor 834)
12. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2577);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2577) diubah sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan Dokumen Perubahan Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang memuat kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 digunakan sebagai:

- a. Pedoman dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. Pedoman dalam Penetapan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2022; dan
- c. Acuan menyusun Perubahan APBD Tahun 2022.

Pasal 3

(1) Isi dan Uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN; |
| BAB II | : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SEMESTER 1 (SATU) TAHUN 2022; |
| BAB III | : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; |

- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI : PENUTUP.

(2) Uraian secara rinci RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2664

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022

Kata Pengantar

Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2022 merupakan salah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Semoga Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2022 menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam rangka menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah serta dapat memenuhi harapan semua pihak untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai secara berkelanjutan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I - 4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SEMESTER I TAHUN 2022	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II - 1
2.2. Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Banggai Tahun 2022 dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya.....	II - 27
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2022	III - 1
3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2022	III - 19
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
5.1 Perubahan Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2022...	V - 1
5.2 Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	V - 9
BAB VI : PENUTUP	VI - 1

Daftar Gambar

Gambar 3.1	PDRB ADH dan ADHK Kabupaten Banggai (Milyar Rupiah) Tahun 2015 – 2021	III - 4
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2017 – 2021 (%)	III - 9
Gambar 3.3	Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2017 – 2021	III - 13
Gambar 3.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2012 – 2021	III - 14
Gambar 3.5	Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2015 – 2021	III - 15
Gambar 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun 2011 – 2020	III - 15
Gambar 3.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2011 – 2021	III - 16
Gambar 4.1	Tema RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022	IV - 1
Gambar 4.2	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022	IV - 3
Gambar 4.3	Sinkronisasi/Ketergantungan Misi Daerah Tahun 2021 – 2026 dengan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022	IV - 9
Gambar 4.4	Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022	IV - 11

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banggai Tahun 2021 (Semester I)	II - 2
Tabel 2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Rkpd Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	II - 5
Tabel 2.3	Realisasi APBD Kabupaten Banggai Tahun 2021 Semester I dan Prognosis 6 (enam) Bulan berikutnya	II - 28
Tabel 3.1	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021	III - 5
Tabel 3.2	PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021 (miliar Rp.)	III - 7
Tabel 3.3	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021 (miliar Rp.)	III - 8
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017 – 2021	III - 10
Tabel 3.5	PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2017 – 2021	III - 12
Tabel 3.6	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Banggai Tahun 2022 ...	III - 18
Tabel 3.7	Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 (Rupiah)	III - 20
Tabel 3.8	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021 (Rupiah)	III - 22
Tabel 3.9	Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2021 (Rupiah)	III - 24
Tabel 3.10	Target Pembiayaan Daerah Tahun 2022 (Rupiah)	III - 25
Tabel 4.1	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Prioritas Daerah Tahun 2022	IV - 3
Tabel 4.2	Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Tengah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022	IV - 10
Tabel 4.3	Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Daerah Kabupaten Banggai tahun 2022	IV - 12

Tabel 4.4	Persandingan Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional, Peopinsi Sulawesi tengah dan Kabupaten Banggai Tahun 2022	IV - 15
Tabel 5.1	Organisasi Perangkat Daerah/Perangkat Daerah yang melakukan Penambahan, Pengurangan dan Penghapusan Kegiatan Tahun 2022	V - 5
Tabel 5.2	Perubahan Kerangka Pendanaan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022	V - 9
Tabel 5.3	Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah	V - 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2022, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor : 26 Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, sebagai penjabaran tahun ke satu atau tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026. RKPD Tahun 2022 disusun untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Banggai guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, melalui sinergi dan sinkronisasi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat 5 menyebutkan bahwa RKPD dapat di ubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) s/d (9) disebutkan Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- d. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan dan /atau sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022 di susun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 10);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022 yaitu untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan daerah Kabupaten Banggai sebagai akibat dari adanya beberapa perubahan asumsi yang sudah ditetapkan, sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2022. Sedangkan Tujuan Perubahan RKPD 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah, antar sektor pembangunan, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Sebagai Dasar bagi Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) terutama indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan memuat uraian tentang : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2022, yang menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten

Banggai Tahun 2022 dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya.

- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah memuat uraian tentang : Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tahun 2022 serta Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022.
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah memuat uraian tentang perubahan Tujuan, Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022.
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah memuat uraian tentang perubahan rencana program dan kegiatan masing – masing urusan pemerintahan daerah beserta Perangkat Daerah pengampunya di sertai perubahan kerangka pendanaan untuk Tahun Anggaran 2022.
- BAB VI Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SEMESTER I TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Sebagaimana penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan tahun berjalan di maksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara mengukur realisasi kinerja dibandingkan dengan target. Hasil pengukuran kinerja memberi gambaran terhadap pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan pada periode berikutnya.

2.1.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banggai Tahun 2021

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026. Dalam dokumen RPJMD tersebut, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis Pemda dengan 17 Indikator. Karena berada pada awal periode perencanaan, agian besar dari indikator kinerja utama tersebut telah tercapai, sebagaimana di gambarkan pada table 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Banggai Tahun 2022 (Semester I)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
				Target 2022	Capaian sd semester I 2022	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,69	70,60	98,48
		2. Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	45,3	NA	NA
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,34	3,57	65,54
		4. Angka Kemiskinan	%	6,70	7,83	85,57
		5. Gini Rasio	poin	0,297	0,332	89,46
2.	Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru.	1. Kontribusi usaha perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	%	3,7	5,07	137,02
3.	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	1. Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	%	37,80	NA	NA
4.	Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas.	1. Persentase Infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi Baik	%	70,00	NA	NA
5.	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat	1. Indeks Ketahanan Daerah	Kategori	Rendah	Rendah	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
				Target 2022	Capaian sd semester I 2022	Tingkat Capaian (%)
	dalam Penanggulangan Bencana					
6.	Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	1. Kontribusi Sektor Pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB	%	33,23	44,68	134,46
		2. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86,64	NA	NA
7.	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat.	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	80,418	78,70	97,86
8.	Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	1. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	2,37	2,54	107,173
		2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	48,11	NA	NA
9.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	100
		2. Indeks Inovasi Daerah	Predikat / Kategori	Sangat Inovatif	Inovatif	90
		3. Nilai SAKIP	Predikat	A	A	100

2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I

Berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Banggai tahun 2022 semester I, hasilnya dapat di gambarkan pada table 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2021	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
1	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	01	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Indeks Pembangunan Pendidikan Manusia							
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase pencapaian SPM Pendidikan Dasar				20%	0,04%	0,20%	DINAS PENDIDIKAN
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini				100%	83,12%	83,12%	
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan Dasar				100%	97,6%	97,6%	
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang efektif menerapkan pengembangan kurikulum				19%	0,04%	0,21%	
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang memiliki ijazah Diploma (D.IV), S1, dan sertifikat pendidik pada satuan pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non-formal/Kesetaraan				75%	54%	72%	
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentasi Satuan Pendidikan Dasar yang memiliki izin Operasional				100%	100%	100%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
1 01 06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Cakupan Pengembangan bahasa dan sastra daerah						10%	12,47%	124%	
1 02 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia									
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang Kesehatan						100%	78,40%	78,40%	DINAS KESEHATAN
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan						100%	76,30%	76,30%	DINAS KESEHATAN
1 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman						100%	77,00%	77,00%	
1 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Upaya Promotif dan Preventif						100%	13,60%	13,60%	
1 03 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Indeks Infrastruktur Kabupaten									
1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi						100%	100,00%	100,00%	
1 03 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga						100%	81,53%	81,53%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase prasarana pengolahan persampahan yang tersedia				100%	64,32%	64,32%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				100%	0,00%	0,00%	
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase berfungsi Baik				100%	43,23%	43,23%	
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkungan/setapak berfungsi baik kawasan pemukiman				100%	78,36%	78,36%	
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang memiliki persetujuan bangunan gedung				100%	2,73%	2,73%	
1	03	09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah Lokasi yang ditetapkan rencana tata bangunan dan lingkungannya				100%	24,57%	24,57%	
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten				100%	80,44%	80,44%	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				100%	46,74%	46,74%	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang				100%	56,70%	56,70%	
1	04	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni yang aman dan Terjangkau							
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	cakupan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat				100%	56,76%	56,76%	
				Persentase Rumah Layak Huni yang aman dan Terjangkau				66%	39,84%	60,36%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022		
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase penyediaan perencanaan kawasan permukiman					100%	45,65%	45,65%	DINAS PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	luas Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan kabupaten yang ditangani					100%	78,48%	78,48%	
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU					100%	87,57%	87,57%	
1	04	06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi Kecil					100%	100%	100,00%	
1	05	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)								
				Indeks Ketahanan Daerah								
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan					100%	0%	0,00%	SATPOL-PP DAN DAMKAR
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan layanan informasi rawan bencana, penanganan pra bencana, tanggap darurat bencana dan penanganan pasca bencana					100%	24,34%	24,34%	BPBD
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan layanan pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran dalam waktu tanggap yang ditentukan					100%	26,23%	26,23%	SATPOL-PP DAN DAMKAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
								15 Menit	N/A	0%	
1	06	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Indeks Kesejahteraan Sosial							
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase LKS, PSKS dan Masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial				100%	63,65%	63,65%	
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				100%	52,65%	52,65%	DINAS SOSIAL
	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang tertangani				100%	14,00%	14,00%	
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten				100%	28,52%	28,52%	
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan				100%	0,00%	0,00%	
2	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2021	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
2	07	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)							
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)				100%	22,54%	22,54%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi				100%	34,50%	34,50%	
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya				100%	12,52%	12,52%	
				Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme perluasan kesempatan kerja				100%	0,00%	0,00%	
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB) oleh mediator hubungan industrial				100%	23,30%	23,30%	
2	08	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)							
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)				50%	34,00%	68,00%	
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)				3%	0,0003%	0,001%	
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Presentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif				50%	8,34%	16,69%	
				Rasio kekerasan terhadap perempuan				0%	10%	0,1%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2021	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga pra sejahtera I yang ditingkatkan kualitasnya				4%	1,83%	45,75%	
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak				30%	1,30%	4,33%	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Nilai indikator kabupaten layak anak				500	N/A	0,00%	
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak				35%	1,43%	4,10%	
				Persentase perlindungan khusus terhadap anak yang melapor dan ditangani				100%	100%	100%	
2	09	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Indeks Ketahanan Pangan							
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan				100%	74,65%	74,65%	DINAS KETAPANG
2	09	03	Peningkatan kesejahteraan petani	Jumlah Kelompok tani tanaman pangan binaan yang meningkat kesejahteraannya							DINAS PETERNAKAN
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				80,00	64,35	80,04%	
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang ditangani				100%	12,85%	12,85%	
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan				100%	17,24%	17,24%	DINAS KETAPANG
2	10	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pertanahan							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2021	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Presentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yg diterbitkan				100%	26,45%	26,45%	PERKIMTAN
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	presentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi				100%	57,30%	57,30%	
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan				100%	4,54%	4,54%	
2	10	08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Luasan (ha) tanah kosong yang dinventarisasi dan dimanfaatkan				100%	22,42%	22,42%	
2	10	09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luas tanah yg telah diterbitkan izin				100%	100%	100%	
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase layanan penatagunaan tanah Dalam kurun waktu tertentu				100%	84,53%	84,53%	
2	11	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup							
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	presentase pemenuhan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang di susun				100%	24,43%	24,43%	
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan kualitas air sungai				100%	N/A	0%	
				Persentase pemenuhan kualitas udara				100%	N/A	0%	
				Persentase lokasi yang dilaksanakan proklamasi				100%	N/A	0%	
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengawasan dan pemanfaatan SDA				100%	21,25%	21,25%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2021	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				100%	14,52%	14,52%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten				100%	17,55%	17,55%	
2	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase data dan informasi MHA serta Jenis Kearifan Lokal yang di Akui				100%	70,52%	70,52%	
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pemenuhan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi masyarakat				100%	16,43%	16,43%	
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat / Lembaga masyarakat / dunia usaha / dunia pendidikan / filantropi yang diusulkan untuk memperoleh Penghargaan Lingkungan Hidup				100%	0,00%	0,00%	
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah				100%	23,52%	23,52%	
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengolahan sampah diwilayah				100%	65,34%	65,34%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
2	12	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan layanan pendaftaran penduduk				100%	97,45%	97,45%	DISDUKCAPIL
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan layanan Pencatatan Sipil				100%	96,35%	96,35%	
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi database kependudukan				100%	87,35%	87,35%	
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Data Kependudukan yang dimuat dalam profil				100%	66,52%	66,52%	
2	13	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Indeks Desa Membangun							
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase desa yang dilakukan program penataan desa				100%	24,44%	24,44%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama antar desa dan antar desa dengan pihak ketiga.				100%	32,21%	32,21%	
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib, Transparan dan Akuntabel				100%	26,20%	26,20%	
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan				100%	34,30%	34,30%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
2	14	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)							
				Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				1%	1,46%	68,49%	
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)				65%	N/A	0%	
				Rasio akseptor KB							
				Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49				90%	74,46%	82,73%	
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera				20%	N/A	0%	
2	15	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas							
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat Kelancaran Keamanan dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan				100%	75,33%	75,33%	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yg laik fungsi				100%	54,64%	54,64%	
2	16	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)							
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				100%	78,63%	78,63%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target RKPD Tahun 2021	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022		
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Presentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan kominfo					100%	93,34%	93,34%	DKSP
2	17	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Koperasi								
				Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro								
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten					100%	94,24%	94,24%	
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang memiliki Sertifikat NIK					100%	83,60%	83,60%	
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten					100%	34,36%	34,36%	
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	persentase koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten					100%	23,52%	23,52%	
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan					100%	23,52%	23,52%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
								100%	23,52%	23,52%	DINAS KOPERASI DAN UMKM
								100%	23,52%	23,52%	
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)				100%	87,45%	87,45%	
				Persentase usaha mikro yang diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran				100%	87,45%	87,45%	
				Persentase Usaha Mikro Yang Bermitra				100%	87,45%	87,45%	
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha				100%	87,45%	87,45%	
2	17	08	Program Pengembangan Umkm	Jumlah Unit Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				100%	87,45%	87,45%	
2	18	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Banggai							
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Penanaman modal, Perizinan dan non perizinan							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				100%	23,64%	23,64%	DPMPPTSP
ves	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan investasi PMA/PMDN							
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				100%	54,00%	54,00%	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang taat melaporkan LKPM				100%	63,45%	63,45%	
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten yang dilolah ,disajikan,dan dimanfaatkan				100%	86,94%	86,94%	
2	19	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Indeks Kepemudaan							
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				100%	45,64%	45,64%	DISPORA
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				100%	38,40%	38,40%	
				Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)				100%	100%	100%	
2	19	03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga Pada Event Olahraga Provinsi, Nasional dan Internasional				100%	67,34%	67,34%	
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif				100%	94,34%	94,34%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
2	20	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				100%	100,00%	100,00%	DINAS KOMINFO
2	21	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah				100%	23,45%	23,45%	DINAS KOMINFO
2	22	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Indeks Kebudayaan Daerah							
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan				80%	35,20%	44,00%	
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan				100%	34,52%	34,52%	DINAS PENDIDIKAN
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang Diinventarisasi dan Dibina				100%	43,55%	43,55%	
2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				100%	23,58%	23,58%	
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Cakupan Pengelolaan Museum				100%	26,25%	26,25%	
2	23	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat							
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan				100%	45,20%	45,20%	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Cakupan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno				100%	12,53%	12,53%	
2	24	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip				100%	13,40%	13,40%	DINAS PERPUSTAKAAN
2	24	03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip				100%	23,35%	23,35%	
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK				100%	13,42%	13,42%	
3	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten						
3	25	02	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				22.000 Ton	N/A	0%	DINAS PERIKANAN
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				1.430 Ton	N/A	0%	
3	25	05	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi hasil olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP				18.700 Ton	N/A	0%	
3	26	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		Kontribusi Sektor Parwisata terhadap PDRB						
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama Tinggalnya Wisatawan				3 hari	3 hari	100 %	DINAS
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang				100%	0,34%	0,34%	
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				100%	0,00%	0,00%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai tambah ekonomi kreatif				100%	23,31%	23,31%	PARIWISATA
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase wirausaha ekonomi kreatif baru di bidang pariwisata				100%	5,43%	5,43%	
3	27	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Produktivitas tanaman pangan							
				Produktivitas tanaman hortikultura							
				Produktivitas tanaman perkebunan							
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan							
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase produksi daging				100%			DINAS PETERNAKAN
				Jumlah produksi tanaman pangan andalan (Padi,Jagung,Kedelai,Porang,Kacang Tanah,Kacang Hijau)							DINAS TPHP
				Jumlah produksi tanaman Hortikulura andalan (Bawang Merah,Cabai Rawit,Mangga,Durian, alpukat)							
				Jumlah produksi tanaman Perkebunan andalan (Kelapa Dalam,Kakao,Cengkeh,Pala,Lada, Kopi,Nilam)							
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana Peternakan yang digunakan				100%	34,31%	34,31%	DINAS PETERNAKAN
				Persentase pemenuhan prasarana pertanian prapanen dan sarana pendukungnya				10%	13,34%	133,42%	DINAS TPHP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/ternak				100%	14,54%	14,54%	DINAS PETERNAKAN
3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				25%	20,41%	81,64%	DINAS TPHP
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan Jasa Usaha Peternakan				100%	23,13%	23,13%	DINAS PETERNAKAN
				Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian Kabupaten				100%	1,43%	1,43%	DINAS TPHP
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Binaan/Peternak				100%	32,52%	32,52%	DINAS PETERNAKAN
				Persentase Pendampingan kepenyuluhan terhadap pelaksanaan intervensi kegiatan pemberdayaan bagi petani				100%	34,32%	34,32%	DINAS TPHP
3	29	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
3	29	05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Presentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang memiliki Izin di Kabupaten				100%	0,00%	0,00%	DINAS PERINDAG
3	30	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan				100%	67,52%	67,52%	DINAS PERINDAG
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				100%	32,47%	32,47%	
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu				100%	36,23%	36,23%	
	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor Non-Migas				100%	56,63%	56,63%	
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				100%	34,52%	34,52%	DINAS PERINDAG
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Dalam Negeri yang dikonsumsi/ digunakan oleh Masyarakat				100%	53,54%	53,54%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
3	31	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kontribusi IKM terhadap PDRB Kabupaten Banggai							
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase Zona kawasan Industri potensial yang telah direncanakan							DINAS PERINDAG
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah							
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi Perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri							
3	32	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Presentase Transmigrasi yang Mandiri							
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah yang direncanakan untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				100%			DINAS NAKERTRANS
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luasan Kawasan yang Memenuhi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Sesuai Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				100%			
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	luas Kawasan Transmigrasi Yang dikembangkan				100%			
4	00	00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01	00	SEKRETARIAT DAERAH								
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat				100%	27,43%	27,43%	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti				100%	25,28%	25,28%	
4	02	00	SEKRETARIAT DPRD	Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2021	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase rapat-rapat Dewan yang tepat waktu, tepat tindak lanjut dan tepat sasaran				100%	34,63%	34,63%	SEKRETARIAT DPRD
5	00	00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01	00	PERENCANAAN	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah							
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi				100%	37,42%	37,42%	BAPPEDA DAN LITBANG
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Renja PD Mitra Yang Di Susun Tepat Waktu, Tepat Proses Dan Tepat Isi				100%	45,32%	45,32%	
5	02	00	KEUANGAN	Opini BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah							
				Tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai							
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu, tepat proses, tepat isi				100%	33,56%	33,56%	BPKAD
				Persentase Deviasi Proyeksi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain				100%	34,63%	34,63%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi dan sesuai standar				100%	93,53%	93,53%	BPKAD
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah				100%	44,22%	44,22%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	03	00	KEPEGAWAIAN								
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Tingkat kepuasan ASN terhadap layanan administrasi dan diklat kepegawaian daerah				77,5%	64,58%	83,33%	BKPSDM
5	04	00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kompetensi sumber daya aparatur				75%	56,98%	75,97%	BKPSDM
5	05	00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Indeks Inovasi Daerah							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2021	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang diitindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah				100%	12,54%	12,54%	BAPPEDA DAN LITBANG
6	00	00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	01	00	INSPEKTORAT DAERAH	Maturitas APIP							
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penurunan temuan berdasarkan wilayah/objek pemeriksaan				100%	100%	100%	INSPEKTORAT
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	rata- rata nilai reformasi birokrasi perangkat daerah				A	B	80%	
7	00	00	UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01	00	KECAMATAN								
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					100%	60%	60%	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					100%	54%	54%	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					100%	52%	52%	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					100%	61%	61%	
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100%	52%	52%	
8	00	00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	01	00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase Masyarakat yang faham dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik							
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan				100%	34,63%	34,63%	
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase masyarakat kabupaten bangga yang menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum (legislatif, pilpres dan pilkada)				100%	96,63%	96,63%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2021	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022	
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan				100%	26,75%	26,75%	BADAN KESATUAN BANGSA DA POLITIK
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				100%	36,84%	36,84%	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial				100%	29,45%	29,45%	

2.2 Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Banggai Tahun 2021 dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya.

Berdasarkan laporan realisasi semester Pertama APBD Kabupaten Banggai Tahun 2021, realisasi pendapatan daerah adalah sebesar **Rp.693.181.642.329,87** atau **36,11%** dari Target pendapatan yang di tetapkan sebesar Rp. 1.919.778.654.011,00,-, sehingga sisa anggaran pendapatan sampai dengan semester pertama adalah Rp. 1.226.597.011.682,53,- dengan capaian sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 (prognosis) di perkirakan sebesar Rp. 1.217.939.448.710,53 atau di perkirakan akan terealisasi sebesar 99,29%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan semester I tahun 2021 sebesar **Rp.41.818.543.641,47,-** atau **18,17%** dari Target PAD yang di tetapkan sebesar Rp.230.113.526.688,00,- sehingga sisa anggaran PAD sampai dengan semester pertama adalah Rp.188.294.983.046,53,- Prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran di perkirakan sebesar Rp. 207.374.143.074,53,- atau akan mencapai 90,11%. Sedangkan untuk pendapatan transfer, realisasi semester I sebesar **Rp.648.772.385.342,00,-** atau **39,99%** dari Target Pendapatan Transfer yang di tetapkan sebesar Rp.1.622.023.735.213,00,- sehingga sisa anggaran transfer sampai dengan semester pertama adalah Rp.973.251.349.871,00,- Prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran di perkirakan sebesar Rp.945.514.626.871,00,- atau akan mencapai 97,15%. Realisasi semeseter pertama Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.2.590.713.345,00 atau 3,83%. dari target Rp.67.641.392.110,00,- di perkirakan pada akhir tahun anggaran akan terealisasi sebesar Rp.65.050.678.765,00,- atau 96,16%.

Sedangkan untuk realisasi Belanja, sampai dengan semester I Tahun 2021 mencapai 27,84%, yaitu sebesar Rp. 560.555.414.406,00,- dari Rp. 2.013.156.641.841,00,- yang di tetapkan dalam APBD 2021.

Sehingga sisa anggaran belanja sampai dengan semester pertama adalah sebesar Rp.1.452.601.227.435,00,-. Prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran di perkirakan akan terealisasi sebesar Rp.1.430.887.702.510,00,- atau 98,50%. Realisasi masing – masing komponen belanja dapat di jelaskan yaitu Belanja Operasi sebesar Rp.480.724.700.929,00,- atau terealisasi 34,73%, Belanja Modal sebesar Rp.17.688.090.912,00,- atau terealisasi 7,74%.

Rincian lengkap Realisasi APBD Kabupaten Banggai Tahun 2021 Semester I dan Prognosis 6 (enam) Bulan berikutnya, adalah sebagaimana table 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Realisasi APBD Kabupaten Banggai Tahun 2022 Semester I dan Prognosis 6 (enam) Bulan berikutnya

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
4	PENDAPATAN DAERAH	2.259.156.091.278,00	641.097.798.337,10	1.618.058.292.940,90	1.618.058.292.940,90	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	299.653.834.452,00	41.734.773.494,10	257.919.060.957,90	257.919.060.957,90	
4.1.01	Pajak Daerah	134.176.713.345,00	25.195.783.241,26	108.980.930.103,74	108.980.930.103,74	
4.1.01.06	Pajak Hotel	8.550.000.000,00	961.128.720,00	7.588.871.280,00	7.588.871.280,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	17.850.500.000,00	4.464.767.419,26	13.385.732.580,74	13.385.732.580,74	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	675.000.000,00	47.692.430,00	627.307.570,00	627.307.570,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	6.771.440.000,00	340.370.093,50	6.431.069.906,50	6.431.069.906,50	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	34.532.890.146,00	10.634.448.561,00	23.898.441.585,00	23.898.441.585,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	500.000.000,00	55.385.800,00	444.614.200,00	444.614.200,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	6.000.000.000,00	1.536.344.504,00	4.463.655.496,00	4.463.655.496,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.090.700.000,00	2.253.180.215,40	21.837.519.784,60	21.837.519.784,60	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	20.621.543.199,00	2.677.468.142,10	17.944.075.056,90	17.944.075.056,90	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.584.640.000,00	2.224.997.356,00	12.359.642.644,00	12.359.642.644,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	46.486.034.900,00	5.270.105.105,00	41.215.929.795,00	41.215.929.795,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	20.858.504.900,00	2.078.523.000,00	18.779.981.900,00	18.779.981.900,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	16.585.045.000,00	1.828.659.025,00	14.756.385.975,00	14.756.385.975,00	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	9.042.485.000,00	1.362.923.080,00	7.679.561.920,00	7.679.561.920,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	3.962.201.302,68	-1.362.201.302,68	-1.362.201.302,68	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.600.000.000,00	3.962.201.302,68	-1.362.201.302,68	-1.362.201.302,68	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	116.391.086.207,00	7.306.683.845,16	109.084.402.361,84	109.084.402.361,84	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.100.000.000,00	1.179.605.947,00	-79.605.947,00	-79.605.947,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	5.859.900.000,00	2.620.698.509,40	3.239.201.490,60	3.239.201.490,60	
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	39.066.000,00	189.941.709,00	-150.875.709,00	-150.875.709,00	
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.384.471.937,00	2.022.998.740,76	-638.526.803,76	-638.526.803,76	
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	41.431.553,00	-41.431.553,00	-41.431.553,00	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	934.661.917,00	1.252.007.386,00	-317.345.469,00	-317.345.469,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	82.228.104.165,00	0,00	82.228.104.165,00	82.228.104.165,00	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	24.844.882.188,00	0,00	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.945.682.715.566,00	593.654.158.988,00	1.352.028.556.578,00	1.352.028.556.578,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.892.531.367.568,00	574.049.770.005,00	1.318.481.597.563,00	1.318.481.597.563,00	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.654.293.147.568,00	565.393.066.005,00	1.088.900.081.563,00	1.088.900.081.563,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	17.313.409.000,00	8.656.704.000,00	8.656.705.000,00	8.656.705.000,00	

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
4.2.01.05	Dana Desa	220.924.811.000,00	0,00	220.924.811.000,00	220.924.811.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.151.347.998,00	19.604.388.983,00	33.546.959.015,00	33.546.959.015,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	53.151.347.998,00	19.604.388.983,00	33.546.959.015,00	33.546.959.015,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.819.541.260,00	5.708.865.855,00	8.110.675.405,00	8.110.675.405,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.819.541.260,00	5.708.865.855,00	8.110.675.405,00	8.110.675.405,00	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	13.819.541.260,00	5.708.865.855,00	8.110.675.405,00	8.110.675.405,00	
5	BELANJA DAERAH	2.317.589.895.132,00	570.382.550.435,00	1.747.207.344.697,00	1.747.207.344.697,00	
5.1	BELANJA OPERASI	1.627.489.093.049,00	467.753.662.110,00	1.159.735.430.939,00	1.159.735.430.939,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	847.497.221.925,00	329.054.748.297,00	518.442.473.628,00	518.442.473.628,00	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	538.774.157.510,00	236.854.688.645,00	301.919.468.865,00	301.919.468.865,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	148.567.622.585,00	53.467.587.313,00	95.100.035.272,00	95.100.035.272,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	130.456.697.266,00	29.705.833.714,00	100.750.863.552,00	100.750.863.552,00	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.082.252.058,00	8.564.593.794,00	18.517.658.264,00	18.517.658.264,00	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	870.380.006,00	85.044.831,00	785.335.175,00	785.335.175,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	952.800.000,00	377.000.000,00	575.800.000,00	575.800.000,00	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	793.312.500,00	0,00	793.312.500,00	793.312.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.762.348.593,00	131.154.413.811,00	604.607.934.782,00	604.607.934.782,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	179.181.696.229,00	19.930.771.317,00	159.250.924.912,00	159.250.924.912,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	254.166.061.491,00	77.140.966.252,00	177.025.095.239,00	177.025.095.239,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	58.470.640.086,00	7.819.696.774,00	50.650.943.312,00	50.650.943.312,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	119.629.286.122,00	26.180.829.468,00	93.448.456.654,00	93.448.456.654,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.627.475.000,00	82.150.000,00	9.545.325.000,00	9.545.325.000,00	
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	37.063.560.000,00	0,00	37.063.560.000,00	37.063.560.000,00	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	77.623.629.665,00	0,00	77.623.629.665,00	77.623.629.665,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000,00	0,00	404.000.000,00	404.000.000,00	
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	404.000.000,00	0,00	404.000.000,00	404.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	43.185.522.531,00	7.024.500.002,00	36.161.022.529,00	36.161.022.529,00	
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.900.015.392,00	250.000.000,00	1.650.015.392,00	1.650.015.392,00	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.663.710.999,00	6.774.500.002,00	29.889.210.997,00	29.889.210.997,00	
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.863.140.000,00	0,00	3.863.140.000,00	3.863.140.000,00	
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	758.656.140,00	0,00	758.656.140,00	758.656.140,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	640.000.000,00	520.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	640.000.000,00	520.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL	335.177.125.579,00	37.516.348.022,00	297.660.777.557,00	297.660.777.557,00	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.092.601.431,00	9.110.272.035,00	57.982.329.396,00	57.982.329.396,00	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.800.000.000,00	4.751.910.000,00	48.090.000,00	48.090.000,00	

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	14.730.325.000,00	989.430.650,00	13.740.894.350,00	13.740.894.350,00	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	85.282.500,00	0,00	85.282.500,00	85.282.500,00	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	167.630.750,00	1.905.750,00	165.725.000,00	165.725.000,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.400.873.188,00	1.344.620.808,00	8.056.252.380,00	8.056.252.380,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.070.457.615,00	94.743.125,00	975.714.490,00	975.714.490,00	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.187.814.113,00	0,00	12.187.814.113,00	12.187.814.113,00	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	17.203.345.560,00	0,00	17.203.345.560,00	17.203.345.560,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.066.864.855,00	1.845.448.352,00	5.221.416.503,00	5.221.416.503,00	
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	101.500.000,00	73.400.000,00	28.100.000,00	28.100.000,00	
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	31.811.850,00	8.813.350,00	22.998.500,00	22.998.500,00	
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	46.696.000,00	0,00	46.696.000,00	46.696.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.137.121.452,00	3.339.678.000,00	119.797.443.452,00	119.797.443.452,00	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	116.038.766.401,00	2.941.733.000,00	113.097.033.401,00	113.097.033.401,00	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.098.355.051,00	397.945.000,00	6.700.410.051,00	6.700.410.051,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.524.902.696,00	25.066.397.987,00	117.458.504.709,00	117.458.504.709,00	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	99.069.705.786,00	18.596.627.456,00	80.473.078.330,00	80.473.078.330,00	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	34.767.810.259,00	6.469.770.531,00	28.298.039.728,00	28.298.039.728,00	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.270.000.000,00	0,00	5.270.000.000,00	5.270.000.000,00	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.417.386.651,00	0,00	3.417.386.651,00	3.417.386.651,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.122.500.000,00	0,00	2.122.500.000,00	2.122.500.000,00	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	822.500.000,00	0,00	822.500.000,00	822.500.000,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	977.915.700,00	2.022.084.300,00	2.022.084.300,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	977.915.700,00	2.022.084.300,00	2.022.084.300,00	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	977.915.700,00	2.022.084.300,00	2.022.084.300,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	351.923.676.504,00	64.134.624.603,00	287.789.051.901,00	287.789.051.901,00	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.066.274.824,00	9.009.731.113,00	9.056.543.711,00	9.056.543.711,00	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	13.417.671.334,00	6.693.416.658,00	6.724.254.676,00	6.724.254.676,00	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.648.603.490,00	2.316.314.455,00	2.332.289.035,00	2.332.289.035,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	333.857.401.680,00	55.124.893.490,00	278.732.508.190,00	278.732.508.190,00	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	333.857.401.680,00	55.124.893.490,00	278.732.508.190,00	278.732.508.190,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(58.433.803.854,00)	70.715.247.902,10	(129.149.051.756,10)	(129.149.051.756,10)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	64.433.803.854,00	0,00	64.433.803.854,00	64.433.803.854,00	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.433.803.854,00	0,00	61.433.803.854,00	61.433.803.854,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.433.803.854,00	0,00	60.433.803.854,00	60.433.803.854,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	60.433.803.854,00	0,00	60.433.803.854,00	60.433.803.854,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
6.1.05.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
6.2.04.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	58.433.803.854,00	0,00	58.433.803.854,00	58.433.803.854,00	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(116.867.607.708,00)	70.715.247.902,10	(187.582.855.610,10)	(187.582.855.610,10)	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perubahan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2022 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021, target tahun 2021 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2022. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 mengikuti kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi Propinsi Sulawesi Tengah, yang akan difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas produksi perekonomian menuju transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan akan berada dalam kisaran 5,3%-5,9%, dengan sumber pertumbuhan yang pertama dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi (kisaran 5%), investasi (kisaran 6%), dan ekspor (kisaran 6%-7%), seiring dengan hilirisasi industri dan permintaan global. Dari sisi suplai, sumber utama pertumbuhan dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan yang tumbuh sebesar pra

pandemi, sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor pertanian. Terutama dari sektor industri pengolahan yang menjadi tantangan untuk dikembalikan pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi. Inflasi juga menjadi tantangan ke depan, dan ini harus diperhatikan supaya tetap terkendali. Skema peran Bank Indonesia juga diharapkan dikembalikan untuk bisa menangani *secondary market*, terutama untuk SBN.

Searah dengan kebijakan ekonomi nasional diatas, Arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Tengah pada tahun 2022 lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan fiskal daerah baik untuk skala provinsi maupun untuk kabupaten yang masih tertinggal melalui pembangunan kawasan food estate, ruas jalan dan jembatan prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan stunting serta tetap memperhatikan tindakan lanjutan penanganan covid-19 dan variannya dan keberlanjutan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah paska bencana 28 September 2018 disamping tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa tahun ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah periode 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Banggai tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banggai pada tahun-tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1,86 setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi akibat dampak dari pandemi Covid 19. Peningkatan ekonomi ini disebabkan oleh meningkatnya produksi disebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi oleh inflasi. Di perkirakan pada tahun 2022

sampai dengan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai akan terus membaik dan tumbuh positif di kisaran 2–5%. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi andil sektor- sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah yang menunjukkan perbaikan selama tahun 2022 ini. Disamping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

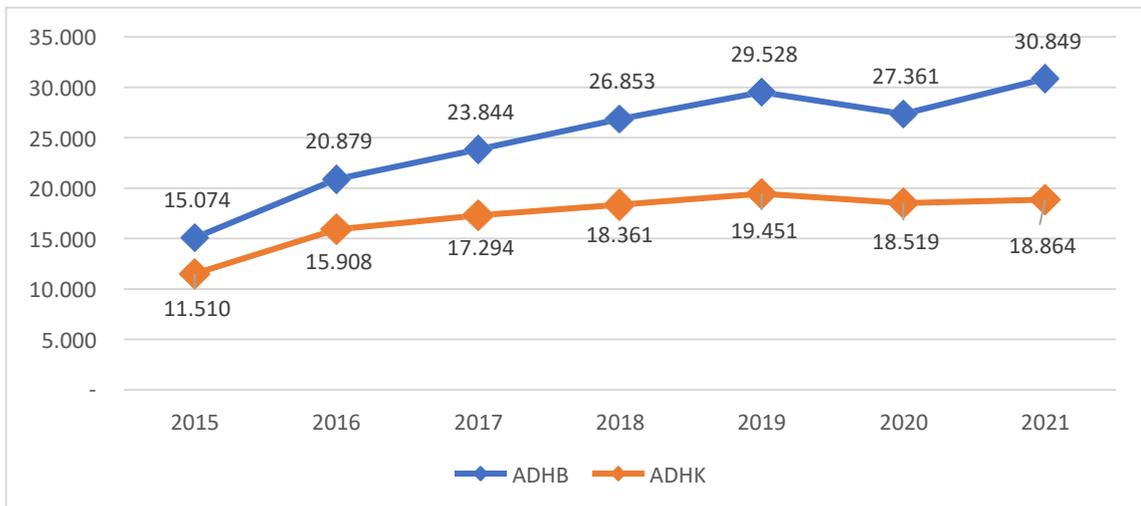
3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2021

a. PDRB dan Struktur Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 30,85 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 3,49 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 27,36 triliun rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh bertambahnya produksi di sebagian besar lapangan usaha akibat telah berkurangnya kasus COVID-19.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 18,52 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 18,86 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Banggai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 1,86 persen. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Gambar 3.1
PDRB ADH dan ADHK Kabupaten Banggai (Milyar Rupiah)
Tahun 2015 – 2021



Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Banggai didominasi oleh 3(tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banggai. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Banggai pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 26,85 persen (angka ini menurun dari 26,91 persen ditahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,51 persen (menurun dari 22,96 persen ditahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,17 persen (meningkat dari 21,13 persen ditahun 2017). Adapun lapangan usaha lain memiliki peran masing-masing kurang dari 10 persen.

Tabel 3.1
Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,96	21,98	22,02	23,38	22,51
2.	Pertambangan dan Penggalian	21,13	22,79	22,73	22,92	22,17
3.	Industri Pengolahan	26,91	26,33	26,48	24,29	26,85
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
5.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6.	Konstruksi	8,00	8,06	8,08	7,87	7,38
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,83	4,93	4,98	5,16	5,07
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,93	2,92	3,02	2,19	2,21
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,33	0,32	0,30	0,33
10.	Informasi dan Komunikasi	2,08	2,25	2,24	2,58	2,60
11.	Jasa Keuangan	2,06	1,71	1,57	1,90	1,96
12.	Real Estate	1,51	1,51	1,42	1,56	1,42
13.	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,23	3,39	3,44	3,83	3,67
15.	Jasa Pendidikan	2,75	2,55	2,42	2,58	2,43
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,64	0,63	0,67	0,79	0,78
17.	Jasa Lainnya	0,49	0,48	0,46	0,50	0,47

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertambangan dan Penggalian adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Industri Pengolahan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya cenderung fluktuatif. Salah satu penyebab menurunnya peranan Industri Pengolahan adalah berkurangnya jumlah produksi pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Industri Pengolahan.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai 6,945 triliun rupiah atau sebesar 22,51 persen. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

mengalami penurunan dari tahun ketahun. Namun demikian selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini tetap memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Banggai. Pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu dari 3,91 persen menjadi -2,66 persen pada tahun 2020. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 3,58 persen.

Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Banggai sebesar 5.037,38 miliar rupiah atau sekitar 21,13 persen tahun 2017 dan meningkat menjadi 6.839,15 miliar rupiah atau sekitar 22,17 persen pada tahun 2021. Adapun laju pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2021 ini mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 1,36 persen pada tahun 2020 menjadi -0,44 persen pada tahun 2021.

Kontribusi kategori Industri Pengolahan tidak mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 kontribusi kategori ini terhadap total PDRB Kabupaten Banggai adalah 8.282,64 miliar rupiah atau sebesar 26,85 persen. Sementara itu laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu -2,35 persen di mana pada tahun sebelumnya juga turun sebesar -10,77persen.

PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”.

Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Banggai pada periode 2017 – 2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.2
PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran
Tahun 2017 – 2021 (miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Konsumsi Rumah Tangga	9.205,86	9.846,64	10.838,27	10.457,82	11.583,32
Konsumsi LNPRT	349,51	409,77	469,08	458,57	491,56
Konsumsi Pemerintah	2.473,58	2.595,80	2.914,42	2.914,03	3.254,14
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.061,45	8.628,32	12.437,56	11.356,92	12.424,07
Perubahan Inventori	948,55	2.228,29	-61,76	199,67	247,57
Net Eksport Barang dan Jasa	195,29	3.144,45	2.686,11	1.596,73	2.948,69
PDRB	23.843,66	26.853,27	29.527,93	27.360,88	30.849,36

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2021

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai pada periode 2017–2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.3
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran
Tahun 2017 – 2021 (miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Konsumsi Rumah Tangga	6.113,56	6.467,25	6.749,72	6.461,82	6.639,68
Konsumsi LNPRT	238,27	273,28	283,55	274,57	277,88
Konsumsi Pemerintah	1.467,01	1.467,14	1.518,66	1.442,46	1.503,06
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.952,11	5.262,04	7.295,77	6.823,07	7.007,51
Perubahan Inventori	526,81	1.362,31	-23,08	196,39	145,25
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.996,53	3.528,47	3.626,05	3.379,57	3.290,87
PDRB	17.294,28	18.360,50	19.512,50	18.579,16	18.864,24

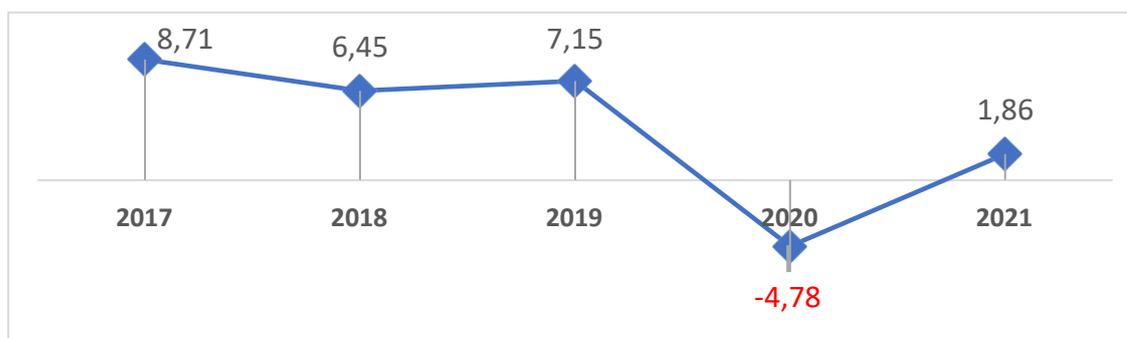
Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Banggai tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 18,86 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 18,52 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,86 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai -4,78 persen.

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai
Tahun 2017 – 2021 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

Pertumbuhan ekonomi selama 2021 ditingkatkan oleh adanya peningkatan produksi di kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selain kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang juga menyebabkan peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten

Banggai pada tahun 2021 adalah peningkatan pada kategori Konstruksi di mana banyak perusahaan di Kabupaten Banggai yang meningkatkan kembali jumlah produksi usai pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 20,69 dan 12,23 persen. Salah satu penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ini adalah berakhirnya pandemi COVID-19 di Kabupaten Banggai yang menyebabkan bertambahnya produksi kategori ini di Kabupaten Banggai. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, lima belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,33 hingga 20,69 persen. Sedangkan dua

lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan negatif hingga -2,35 persen.

Lima belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tersebut antara lain: lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 20,69 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 12,23 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,92 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,83 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,10 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 6,38 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,01 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,96 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,61 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 3,80 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,68 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 3,60 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,58 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,01 persen, dan lapangan usaha Real Estate sebesar 1,33 persen.

Sedangkan dua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan dan lapangan usaha Industri Pengolahan.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2017 – 2021

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.20	2,86	5,49	-2,79	3,58
2.	Pertambangan dan Penggalian	13.65	7,76	10,15	1,36	-0,44
.	Industri Pengolahan	10.42	7,33	3,75	-10,79	-2,35
4.	Pengadaan Listrik, Gas	9.67	8,42	9,02	5,09	3,68
5.	Pengadaan Air	9.96	4,04	-2,17	4,21	6,01
6.	Konstruksi	6.98	5,93	10,10	-13,16	3,80
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3.90	6,11	3,49	-5,81	9,10
8.	Transportasi dan Pergudangan	7.30	4,87	5,29	-33,88	10,92
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.63	4,85	2,75	-14,53	20,69
10.	Informasi dan Komunikasi	7.34	12,24	5,50	8,10	12,23
11.	Jasa Keuangan	11.16	2,03	0,49	12,10	9,83
12.	Real Estate	4.04	4,93	0,90	0,10	1,33
13.	Jasa Perusahaan	16.01	7,27	5,76	-1,82	3,60
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4.70	9,13	6,12	1,77	5,92
15.	Jasa Pendidikan	7.22	4,16	3,66	-2,77	5,61
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.58	3,65	7,39	8,20	3,01
17.	Jasa Lainnya	7.14	5,50	2,31	-0,01	6,38
	PDRB	8.71	6.17	6,27	-4,78	1,86

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

c. PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan karena pengaruh COVID-19. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 65,22 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 78,36 juta rupiah kemudian turun di tahun 2020 hingga senilai 75,99 juta rupiah, dan kembali naik pada tahun 2021 menjadi 85,16 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan pengaruh inflasi yang menurun.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku Gambaran perkembangan PDRB perkapita

Kabupaten Banggai berdasarkan harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2017–2021, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2017 - 2021

Tahun/Year	2017	2018	2019	2020*	2021**
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiahs)					
- ADHB/ at current price	23.844	26.853	29.528	27.361	30.849
- ADHK/ at 2010 Constant Price	17.294	18.361	19.451	18.519	18.864
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	65.215	72.318	78.363	75.998	85.155
- ADHK/ at 2010 Constant Price	47.302	49.446	51.619	51.438	52.072
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	7,05	4,53	4,39	-0,35	1,23
Jumlah Penduduk (Orang) / Population (People)	365.616	371.322	376.808	360.022 ¹	362.275
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1,55	1,56	1,48	-4,45	0,63

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

d. Inflasi

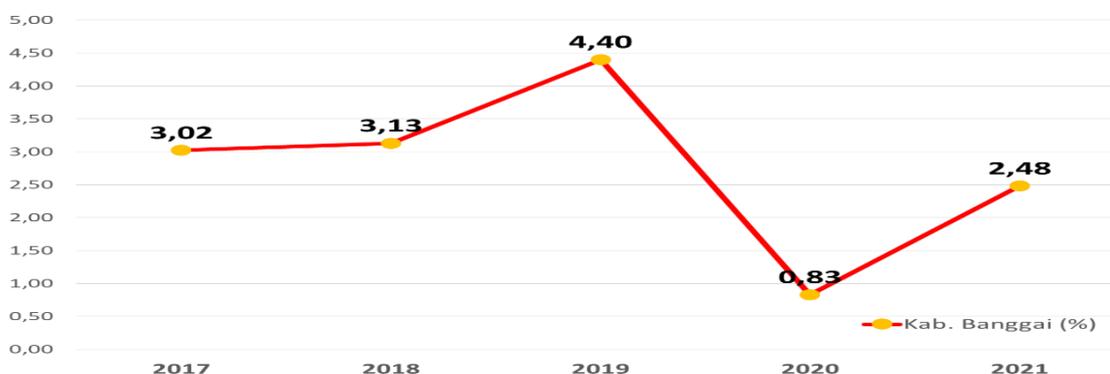
Angka Inflasi Kabupaten Banggai kurun waktu 2017–2021 cenderung fluktuatif dan menunjukkan trend kenaikan, di mana inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,40 % dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,83%.

Pada bulan Desember 2021 Inflasi kota Luwuk adalah sebesar 1,05 persen, sementara inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2020 hingga Desember 2021 sebesar 2,48 persen. Inflasi kota Luwuk pada bulan Desember 2021 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok transportasi sebesar 2,43 persen diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,03 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,39 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,36 persen), kelompok pendidikan (0,20 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,11 persen),

kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,07 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,01 persen), sedangkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami penurunan indeks sebesar 0,13 persen dan kelompok internet, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks sebesar 0,03 persen. Kelompok kesehatan masih terpantau belum mengalami perubahan.

Gambar 3.3

Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2017 - 2021



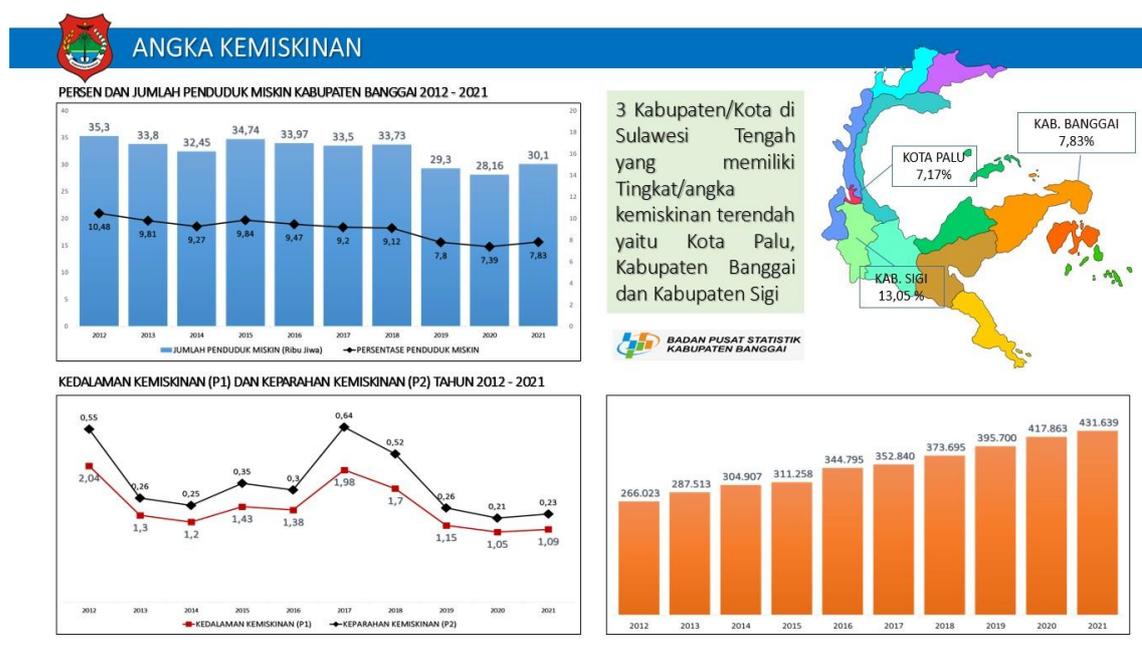
Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2021

e. Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kabupaten Banggai setiap tahun menunjukkan trend penurunan yang mengembirakan. Penurunan kemiskinan yang tajam terjadi pada tahun 2019, di mana angka kemiskinan turun 1,4 % dari 9,12% di tahun 2018 menjadi 7,8% di tahun 2019 atau 29.300 jiwa dan di tahun 2020 turun menjadi 7,39% atau 28.160 jiwa.

Tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan hingga 2020. Pada Maret 2021, akibat adanya pandemi covid-19, tren kemiskinan kembali bertambah. Tetapi Kabupaten Banggai merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan dibawah 10 persen diantara seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah dan menempati urutan kedua terendah setelah Kota Palu. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2012 sampai dengan Maret 2021 ditunjukkan pada gambar 3.4.

Gambar 3.4
Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai
Tahun 2012 - 2021



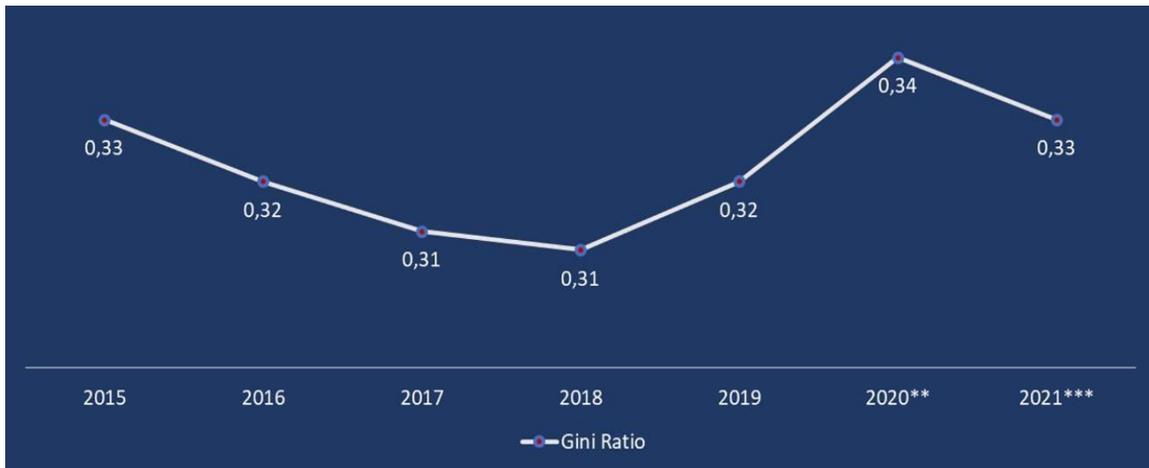
Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

f. Gini Rasio

Angka Gini Rasio Kabupaten Banggai tahun 2015 – 2021 menunjukkan trend penurunan, seiring dengan menurunnya angka kemiskinan. Namun pada tahun 2019 angka Gini Rasio naik menjadi 0,32 point dari tahun 2018 yang sebesar 0,31 point. Pada Tahun 2020 Gini Rasio kembali naik

ke angka 0,34 point dan turun kembali di tahun 2021 ke angka 0,33 yang menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Banggai semakin baik.

Gambar 3.5
Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2015 – 2021

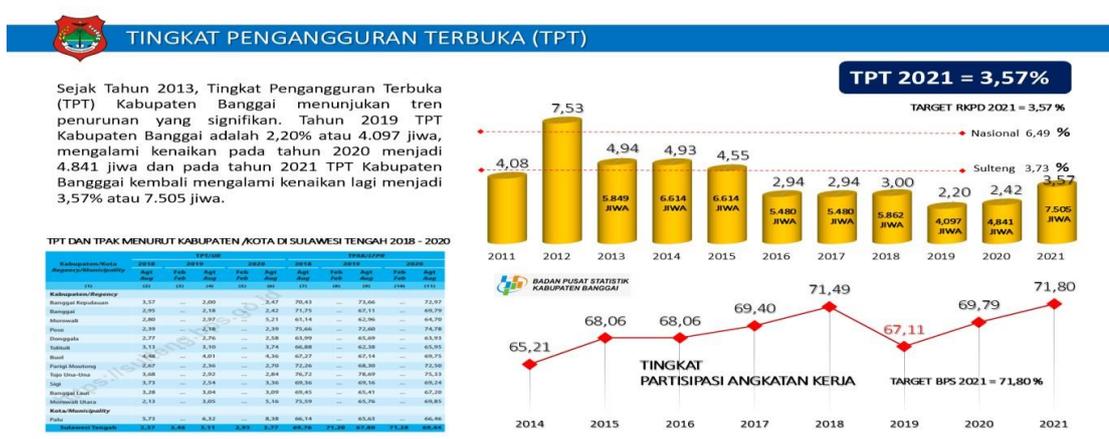


Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2022

g. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Kabupaten Banggai Tahun 2021 mengalami kenaikan sebagai akibat dan dampak dari pandemic Covid -19 yaitu 2,42 % di dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 2,20 %. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,55 %.

Gambar 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun 2011 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

Sementara untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kembali mengalami kenaikan menjadi 71,80% jika di bandingkan dengan TPAK Tahun 2020 yaitu 69,79%

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2011 – 2021 menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan, di mana angka IPM Kabupaten Banggai Tahun 2021 yaitu 70,60 Point.

Gambar 3.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2011 - 2021



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

3.1.1.2 Perkiraan Tahun 2022 (Pasca pandemi Covid-19)

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2021 sebagaimana di uraikan di atas, dan mencermati perkembangan perekonomian nasional dan Propinsi Sulawesi Tengah pada kondisi pasca pandemi Covid-19 saat ini, maka perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Banggai Tahun 2022 dapat di gambarkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi di harapkan akan kembali tumbuh positif di kisaran pertumbuhan sebesar 2,0 – 5,0%, hal ini mendasari optimisme pemerintah pusat dan pemerintah

Propinsi Sulawesi Tengah yang memperkirakan ekonomi bisa segera pulih di tahun 2022.

2. Kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan kembali trend peningkatan. Hal ini antara lain di sebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemic covid-19. Tahun 2022 akan menjadi momentum dan penanganan pandemi sudah semakin terkendali, meskipun masih ada varian omicron yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin baik ini harus kita pakai untuk membangkitkan optimisme, memberikan keyakinan, memberikan kepercayaan yang lebih besar pada masyarakat dan kepada para pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan aktivitas-aktivitas produktif lainnya. Kondisi ini di harapkan dapat berdampak terhadap meningkatnya kembali pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di maksud.
3. Sektor pertanian dan perikanan di perkirakan akan tetap tumbuh positif dimasa pasca pandemi Covid-19. Hal ini juga di dukung dengan kebijakan dan insentif pemerintah pusat untuk menjaga sektor pangan tetap berkesinambungan.
4. Sektor konstruksi akan terganggu karena investasi pemerintah daerah di bidang pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, akibat adanya pengalihan sebagian atau *refocusing* anggaran infrastruktur untuk pencegahan dan pemulihan dampak Covid – 19.
5. Tingkat kemiskinan di perkirakan akan menurun, begitu juga dengan Tingkat pengangguran terbuka akibat adanya pekerja di beberapa sektor usaha yang pada saat pandemic di rumahkan. Namun demikian di harapkan dengan kondisi

New Normal saat ini, di mana aktivitas ekonomi telah berjalan kembali serta kebijakan pemerintah melalui upaya pemulihan ekonomi dan stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya di perluas sebagai bentuk *social safety net*, angka kemiskinan dan pengangguran dapat tetap dijaga sesuai yang di targetkan.

6. Pelambatan pertumbuhan ekonomi di harapkan tidak berdampak pada IPM, utamanya pada komponen pengeluaran perkapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Pada masa pandemi Covid-19, penurunan pengeluaran per kapita ini disebabkan oleh merosotnya konsumsi rumah tangga akibat menurunnya pendapatan dan daya beli. Pembatasan aktivitas penduduk selama pandemi menyebabkan adanya pekerja yang dirumahkan serta terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal. Pada masa *new normal* saat ini di perkirakan pendapatan masyarakat kembali pulih sehingga daya beli masyarakat akan meningkat.

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas, di proyeksikan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2022 sebagaimana pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.6
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Banggai Tahun 2022

Indikator Makro	Target 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,23 – 3,96
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,34 - 2,30
Tingkat Kemiskinan (%)	6,70 - 6,0
Rasio Gini (Indeks)	0,31 - 0,297
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69 – 71,93
Inflasi	2,08

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2022

Arah Kebijakan Keuangan daerah, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dioperasionalkan di dalam APBD. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan agar seluruh sumber keuangan yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022, kebijakan keuangan daerah mengacu pada kondisi sebagai berikut :

1. Penyesuaian kebijakan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/52/BPKAD-G.ST/2022, tanggal 16 Februari 2022 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
2. Penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
3. Penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
4. Penyesuaian Peraturan Presiden 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Penyesuaian Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/42/Bapenda/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2021.
6. Hasil evaluasi tahun berjalan atas implementasi kebijakan keuangan daerah yang telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Banggai Tahun

- 2022 sampai dengan pelaksanaan hingga Triwulan II Tahun 2022;
7. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 8. Keadaan Darurat; dan
 9. Keadaan Luar Biasa.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap realisasi APBD TA 2021, proyeksi RKPD Tahun 2022, Penetapan APBD TA 2022 serta realisasi prognosis semester I TA 2022, maka di proyeksikan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2022 (Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2021	RKPD Tahun 2022	APBD Tahun 2022	Perubahan APBD 2022
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.115.832.470.657,83	2.499.935.764.245,00	2.259.156.091.278,00	2.247.443.203.781,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	190.462.159.225,83	299.653.835.452,00	299.653.834.452,00	245.933.053.956,00
4 1 01	Pendapatan Pajak Daerah	65.744.377.908,37	143.670.867.199,00	134.176.713.345,00	92.410.422.000,00
4 1 02	Hasil Retribusi Daerah	9.888.907.182,93	39.299.744.900,00	46.486.034.900,00	20.043.087.851,00
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.813.505.652,75	3.385.720.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.015.368.481,78	113.297.502.353,00	116.391.086.207,00	130.879.544.105,00
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.867.053.767.116,00	2.104.431.875.404,00	1.945.682.715.566,00	1.987.690.608.565,00
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.811.929.220.838,00	2.046.392.722.162,00	1.892.531.367.568,00	1.909.635.339.013,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.124.546.278,00	58.039.153.242,00	53.151.347.998,00	78.055.269.552,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.316.544.316,00	95.850.053.389,00	13.819.541.260,00	13.819.541.260,00
4 3 01	Pendapatan Hibah	9.036.704.640,00	30.364.759.349,00	13.819.541.260,00	13.819.541.260,00
4 3 02	Dana Darurat	-	-	-	-

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2021	RKPD Tahun 2022	APBD Tahun 2022	Perubahan APBD 2022
4 3 02	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	49.279.839.676,00	65.485.294.040,00	-	-
5	BELANJA	1.647.601.020.275,23	2.538.335.038.771,00	2.317.589.895.132,00	2.501.758.902.107,00
5 1	BELANJA OPERASI	1.411.804.852.242,72	1.699.464.573.613,00	1.627.489.093.049,00	1.770.766.763.496,00
5 1 01	Belanja Pegawai	758.945.563.959,00	870.883.000.895,00	847.497.221.925,00	910.312.404.836,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	627.108.627.334,72	795.099.545.006,00	735.762.348.593,00	797.212.340.491,00
5 1 04	Belanja Subsidi	403.840.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00
5 1 05	Belanja Hibah	24.444.820.949,00	33.078.027.712,00	43.185.522.531,00	53.949.208.169,00
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	902.000.000,00	-	640.000.000,00	8.888.810.000,00
5 2	BELANJA MODAL	216.631.648.676,51	258.940.929.331,00	335.177.125.579,00	346.147.936.747,00
5 2 01	Belanja Modal Tanah	251.494.220,00	3.639.763.079,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.282.040.304,00	85.885.124.288,00	67.092.601.431,00	70.928.502.768,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.995.242.897,51	176.048.235.846,00	123.137.121.452,00	126.559.525.505,00
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	123.230.853.685,00	154.837.018.175,00	142.524.902.696,00	146.507.908.474,00
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	872.017.570,00	2.229.724.368,00	2.122.500.000,00	1.852.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.164.519.356,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	32.920.525.360,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	19.164.519.356,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	32.920.525.360,00
5.4	BELANJA TRANSFER	361.190.909.730,00	413.230.599.402,00	351.923.676.504,00	351.923.676.504,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.065.884.050,00	18.316.594.210,00	18.066.274.824,00	18.066.274.824,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.125.025.680,00	394.914.005.192,00	333.857.401.680,00	333.857.401.680,00
	SURPLUS/DEFISIT	107.040.540.652,60	(38.399.275.526,00)	(58.433.803.854,00)	(254.315.698.326,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	149.321.418.004,29	38.399.275.526,00	58.433.803.854,00	254.315.698.326,00
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	162.421.218.005,29	43.399.275.526,00	61.433.803.854,00	257.315.698.326,00
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	149.484.876.757,79	40.399.275.526,00	60.433.803.854,00	256.315.698.326,00
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	37.000.000,00	3,000,000,000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6 1 06	Pinjaman Dalam Negeri	12.899.341.247,50	-	-	-
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.099.800.000,00	5,000,000,000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6 2 02	Penyertaan Modal (Investasi) pemda	0,00	2,000,000,000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	13.099.800.000,00	3,000,000,000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	149.321.418.005,29	38.399.275.526,00	58.433.803.854,00	254.315.698.326,00
	Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	256.361.958.657,89		-	-

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 di lakukan dengan memperhatikan Perubahan kebijakan mencakup hal – hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2/PMK.07/2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
2. Penyesuaian kebijakan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/52/BPKAD-G.ST/2022, tanggal 16 Februari 2022 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
3. Penyesuaian Peraturan Presiden 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
4. Penyesuaian Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/42/Bapenda/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan perubahan arah kebijakan di atas, realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah tahun 2022 di perkirakan sebesar Rp.2.247.443.203.781,00 mengalami penurunan sebesar Rp.11.712.887.497,00 dari pendapatan APBD murni Tahun Anggaran 2022 sebesar 2.259.156.091.278,00 penurunan pendapatan tersebut berasal dari pengurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.53.720.780.496,00 Rincian belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022 (Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2021	RKPD Tahun 2022	APBD Tahun 2022	Perubahan APBD 2022
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.115.832.470.657,83	1.929.778.654.011,00	2.259.156.091.278,00	2.247.443.203.781,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	190.462.159.225,83	299.653.835.452,00	299.653.834.452,00	245.933.053.956,00
4 1 01	Pendapatan Pajak Daerah	65.744.377.908,37	143.670.867.199,00	134.176.713.345,00	92.410.422.000,00
4 1 02	Hasil Retribusi Daerah	9.888.907.182,93	39.299.744.900,00	46.486.034.900,00	20.043.087.851,00
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.813.505.652,75	3.385.720.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.015.368.481,78	113.297.502.353,00	116.391.086.207,00	130.879.544.105,00
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.867.053.767.116,00	2.104.431.875.404,00	1.945.682.715.566,00	1.987.690.608.565,00
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.811.929.220.838,00	2.046.392.722.162,00	1.892.531.367.568,00	1.909.635.339.013,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.124.546.278,00	58.039.153.242,00	53.151.347.998,00	78.055.269.552,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.316.544.316,00	95.850.053.389,00	13.819.541.260,00	13.819.541.260,00
4 3 01	Pendapatan Hibah	9.036.704.640,00	30.364.759.349,00	13.819.541.260,00	13.819.541.260,00
4 3 02	Dana Darurat	-	-	-	-
4 3 02	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	49.279.839.676,00	65.485.294.040,00	-	-

Sumber : BPKAD dan Bappedalitbang Tahun 2022

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan Belanja Daerah yang di tetapkan dalam perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022 adalah menyesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni (semester satu) dan penyesuaian belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer, maka sejumlah perubahan kebijakan belanja harus dilakukan sebagai konsekuensi adanya perubahan pendapatan. Perubahan kebijakan belanja pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Menyesuaikan Perpres 98 tahun 2022, PMK-RI Nomor 2/PMK.07/2022, Keputusan Gubernur Nomor : 980/42/BPKAD-G.ST/2022, Keputusan Gubernur Nomor : 900/52/BAPENDA/2022;
2. Menyesuaikan kebutuhan perubahan anggaran Tunjangan Kinerja Dinamis Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;

3. Mengidentifikasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dengan pertimbangan waktu maupun kesiapan pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pencapaian Janji Bupati dan Wakil Bupati Banggai, usulan reses dan program yang berkaitan langsung dengan ketercapaian indikator sasaran daerah pada RPJMD Kabupaten Banggai;
4. Penggunaan sisa lelang tahun berjalan dengan menyesuaikan harga komponen terhadap harga penawaran, sehingga selisihnya dapat digunakan kembali untuk mendanai kebutuhan anggaran pada perubahan anggaran tahun 2022.

Berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagaimana di atas proyeksi total belanja diperkirakan sebesar Rp.2.501.758.902.107,00 naik sebesar Rp. 184.169.006.975 dari belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.317.589.895.132,00 secara rinci perubahan rencana target belanja daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2022 (Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2021	RKPD Tahun 2022	APBD Tahun 2022	Perubahan APBD 2022
5	BELANJA	1.647.601.020.275,23	2.538.335.038.771,00	2.317.589.895.132,00	2.501.758.902.107,00
5 1	BELANJA OPERASI	1.411.804.852.242,72	1.699.464.573.613,00	1.627.489.093.049,00	1.770.766.763.496,00
5 1 01	Belanja Pegawai	758.945.563.959,00	870.883.000.895,00	847.497.221.925,00	910.312.404.836,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	627.108.627.334,72	795.099.545.006,00	735.762.348.593,00	797.212.340.491,00
5 1 04	Belanja Subsidi	403.840.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00
5 1 05	Belanja Hibah	24.444.820.949,00	33.078.027.712,00	43.185.522.531,00	53.949.208.169,00
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	902.000.000,00	-	640.000.000,00	8.888.810.000,00
5 2	BELANJA MODAL	216.631.648.676,51	258.940.929.331,00	335.177.125.579,00	346.147.936.747,00
5 2 01	Belanja Modal Tanah	251.494.220,00	3.639.763.079,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.282.040.304,00	85.885.124.288,00	67.092.601.431,00	70.928.502.768,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.995.242.897,51	176.048.235.846,00	123.137.121.452,00	126.559.525.505,00
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	123.230.853.685,00	154.837.018.175,00	142.524.902.696,00	146.507.908.474,00

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2021	RKPD Tahun 2022	APBD Tahun 2022	Perubahan APBD 2022
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	872.017.570,00	2.229.724.368,00	2.122.500.000,00	1.852.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.164.519.356,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	32.920.525.360,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	19.164.519.356,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	32.920.525.360,00
5.4	BELANJA TRANSFER	361.190.909.730,00	413.230.599.402,00	351.923.676.504,00	351.923.676.504,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.065.884.050,00	18.316.594.210,00	18.066.274.824,00	18.066.274.824,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.125.025.680,00	394.914.005.192,00	333.857.401.680,00	333.857.401.680,00
	SURPLUS/DEFISIT	107.040.540.652,60	(38.399.275.526,00)	(58.433.803.854,00)	(254.315.698.326,00)

Sumber : BPKAD dan Bappedalitbang Tahun 2022

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Target Pembiayaan Daerah Tahun 2022 (Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2021	RKPD Tahun 2022	APBD Tahun 2022	Perubahan APBD 2022
6	PEMBIAYAAN DAERAH	149.321.418.004,29	38.399.275.526,00	58.433.803.854,00	254.315.698.326,00
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	162.421.218.005,29	43.399.275.526,00	61.433.803.854,00	257.315.698.326,00
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	149.484.876.757,79	40.399.275.526,00	60.433.803.854,00	256.315.698.326,00
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	37.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6 1 06	Pinjaman Dalam Negeri	12.899.341.247,50	-	-	-
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.099.800.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6 2 02	Penyertaan Modal (Investasi) pemda	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	13.099.800.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	149.321.418.005,29	38.399.275.526,00	58.433.803.854,00	254.315.698.326,00
	Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	256.361.958.657,89	-	-	-

Sumber : BPKAD dan BappedaLitbang Tahun 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan tema Pembangunan Nasional dan tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 serta hasil kesepakatan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2021, ditetapkan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 yaitu : **“Pemulihan Sosial Ekonomi melalui Pembangunan Manusia dan Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah”**.

Gambar 4.1
Tema RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022



Tema ini mengarahkan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Banggai di Tahun 2022 di arahkan pada upaya untuk memulihkan kembali kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid – 19 melalui pembangunan manusia pada sektor kesehatan, Pendidikan, kualitas keluarga, anak, perempuan dan pemuda, sektor tenaga kerja serta optimalisasi sektor unggulan daerah di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, IKM, UMKM dan koperasi, agar perekonomian daerah dapat berjalan normal kembali di era *New Normal* dengan penerapan protokol Covid 19 secara ketat. Selain itu, penyediaan infrastruktur wilayah untuk mendukung

pembangunan ekonomi yang berkualitas dan merata mutlak di perlukan, di samping infrastruktur pelayanan dasar, utamanya untuk mendukung pencapaian generasi emas Kabupaten Banggai melalui pencegahan dan penanggulangan stunting. Pandemi Covid-19 juga kemudian menuntut daerah untuk lebih siap dalam penanganan bencana baik alam maupun non alam.

Mendasari permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah tahun 2021, tema pembangunan daerah, serta memperhatikan kriteria penentuan prioritas sebagaimana di raikan sebelumnya, serta Fokus dan Prioritas Nasional (PN) dalam Rancangan Awal RKP tahun 2022 dan Rancangan RKPD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, maka di tetapkan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 yaitu meliputi 1) Industri Pengolahan/Pangan; 2) Pariwisata; 3) Ketahanan Pangan; 4) UMKM dan Wirausaha Baru; 5) Infastruktur; 6) Transformasi Digital; 7) Pembangunan Rendah Karbon; 8) Pelayanan Kesehatan; 9) Peningkatan Perlindungan Sosial; dan 10) Pelayanan Pendidikan dan Ketrampilan. Fokus ini kemudian di jabarkan kedalam 8 (Delapan) Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi.
3. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
4. Ketahanan Pangan Daerah.
5. Investasi Daerah di Sektor Pertambangan
6. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah.
7. Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama
8. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Gambar 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022



Prioritas pembangunan daerah sebagaimana di atas, sesungguhnya merupakan hasil dari analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah, yang kemudian di sarikan menjadi isu strategis daerah. Berdasarkan Isu strategis daerah kemudian di rumuskan prioritas daerah sebagai upaya penyelesaian isu di maksud. Keterhubungan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Prioritas Daerah Tahun 2022

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah (PD)
1. Pemulihan dampak Pandemi Covid 19, melalui penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan social safety net serta persiapan daerah menghadapi era New Normal.	1. Dampak Pandemi Covid-19	PD 1 Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. PD 2 Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi. PD 4 Ketahanan Pangan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah (PD)
2. Akses dan Kualitas layanan pendidikan guna Mewujudkan Banggai Cerdas belum optimal dan masih perlu di tingkatkan	2. Kualitas Sumber Daya Manusia	PD 1 Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Kualitas Layanan Kesehatan menuju Banggai Sehat belum optimal dan masih perlu di tingkatkan.		
4. Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera masih perlu di tingkatkan.		
5. Kualitas Pemuda relatif masih rendah		
6. Prestasi Olah Raga Kabupaten Banggai belum optimal		
7. Kurangnya Tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta kurangnya wirausaha baru		
8. Penanggulangan kemiskinan daerah belum di laksanakan secara terpadu dan terintegrasi	PD 3 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar PD 4 Ketahanan Pangan Daerah	

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah (PD)
9. Kualitas dan konektivitas jaringan jalan, jembatan dan sarana prasarana transportasi masih rendah dan tidak merata	4. Keterbatasan Infrastruktur & Kesenjangan Wilayah	PD 3 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
10. Kualitas Jaringan Irigasi sesuai kewenangan Kabupaten masih perlu di tingkatkan		
11. Infrastruktur pelayanan publik/ perkantoran pemerintah belum memadai		
12. Kualitas layanan Air bersih, air minum, sanitasi dan perumahan layak di perdesaan maupun perkotaan masih rendah.	5. Air Bersih, Sanitasi, Perumahan Layak dan Terjangkau	PD 3 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
13. Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura perlu lebih di tingkatkan untuk mewujudkan Banggai swasembada pangan	6. Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah	PD 4 Ketahanan Pangan Daerah
14. Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan masih perlu di tingkatkan		
15. Populasi dan produksi hasil peternakan masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan Banggai swasembada daging.		

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah (PD)
16. Belum optimalnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan		
17. Kesejahteraan petani, peternak dan nelayan masih rendah dan perlu ditingkatkan serta Kelembagaan petani, peternak dan nelayan yang belum berfungsi optimal.		
18. Belum Optimalnya Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.		
19. Pemanfaatan potensi pertambangan mineral, minyak dan gas bumi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah belum optimal.		
20. Iklim Investasi dan Penanaman modal daerah masih perlu di tingkatkan		
21. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagai bidang, utamanya untuk mendukung ekonomi digital/transformasi digital dan E-Government belum optimal	7. Revolusi Industri 4,0 dan Transformasi Digital	<p>PD 5 Investasi Daerah di Sektor Pertambangan</p> <p>PD 2 Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi.</p> <p>PD 3 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p>

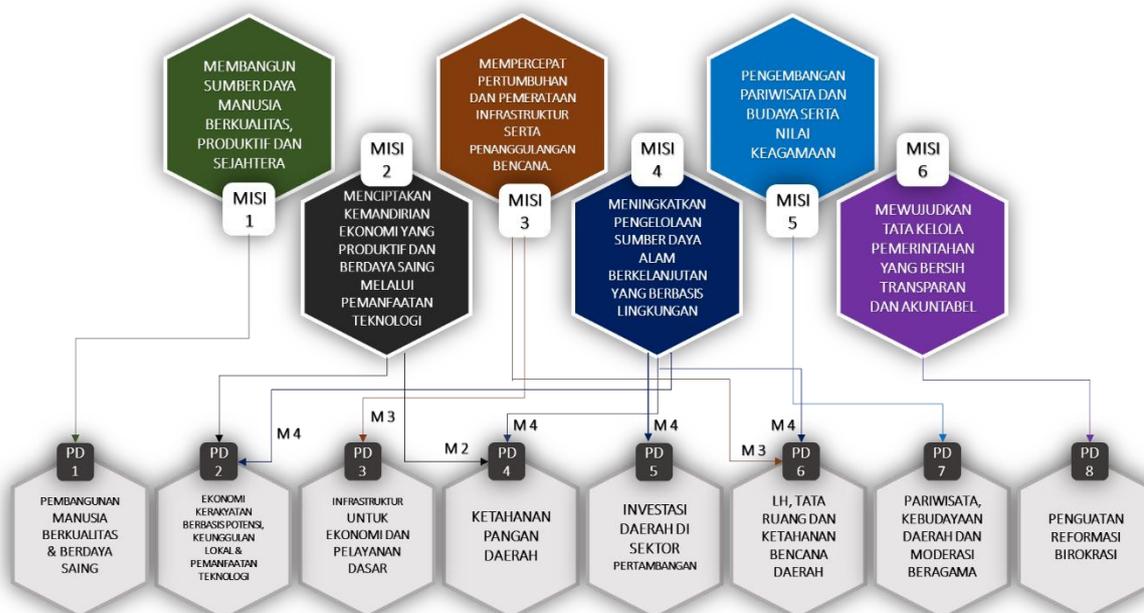
Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah (PD)	
		PD 8 Penguatan Reformasi Birokrasi.	
22. Koordinasi dan integrasi Pemda dan Masyarakat dalam penanggulangan Bencana Daerah belum optimal.	8. Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah	PD 3 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
23. Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup serta dampak perubahan iklim belum terintegrasi dan terlaksana dengan baik		PD 6 Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah	
24. RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan daerah			
25. Pengelolaan Pariwisata Daerah belum terintegrasi dan berkembang dengan baik	9. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Daerah	PD 7 Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama	
26. Pemajuan dan Pelestarian Budaya Banggai, Balantak, Saluan dan Andio (Babasalan) belum di lakukan secara optimal			
27. Kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan saling menghargai antar pemeluk agama			

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah (PD)
masih perlu ditingkatkan		
28. Kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum memuaskan	10. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	PD 8 Penguatan Reformasi Birokrasi.
29. Indeks Inovasi Daerah Cukup Baik, namun perlu di Tingkatkan		
30. Kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah belum optimal		
31. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan		
32. Belum Maksimalnya Penggalan Potensi-Pendapatan Asli Daerah (PAD).		
33. Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda sudah baik, namun masih perlu di tingkatkan		
34. Kualitas Produk Hukum Daerah Belum optimal.		
35. Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah belum tepat fungsi dan tepat ukuran dan Tata Laksana yang belum berbasis TIK		

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah (PD)
36. Kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa belum sesuai yang di harapkan.		
37. Manajemen Sumber Daya Aparatur yang belum optimal		

Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 merupakan upaya prioritas yang akan di lakukan dalam rangka menuntaskan pencapaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2021 – 2026, karena RKPD Tahun 2022 merupakan RKPD pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026. Sinkronisasi/keterhubungan antara Misi Kepala Daerah dengan Prioritas Daerah di maksud sebagaimana pada diagram berikut :

Gambar 4.3
Sinkronisasi/Keterhubungan Misi Daerah Tahun 2021 – 2026
dengan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022



Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, olehnya itu prioritas pembangunan daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2022 juga merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan prioritas nasional dan prioritas pembangunan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Keselarasan prioritas di maksud sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Keselarasn Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Tengah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022

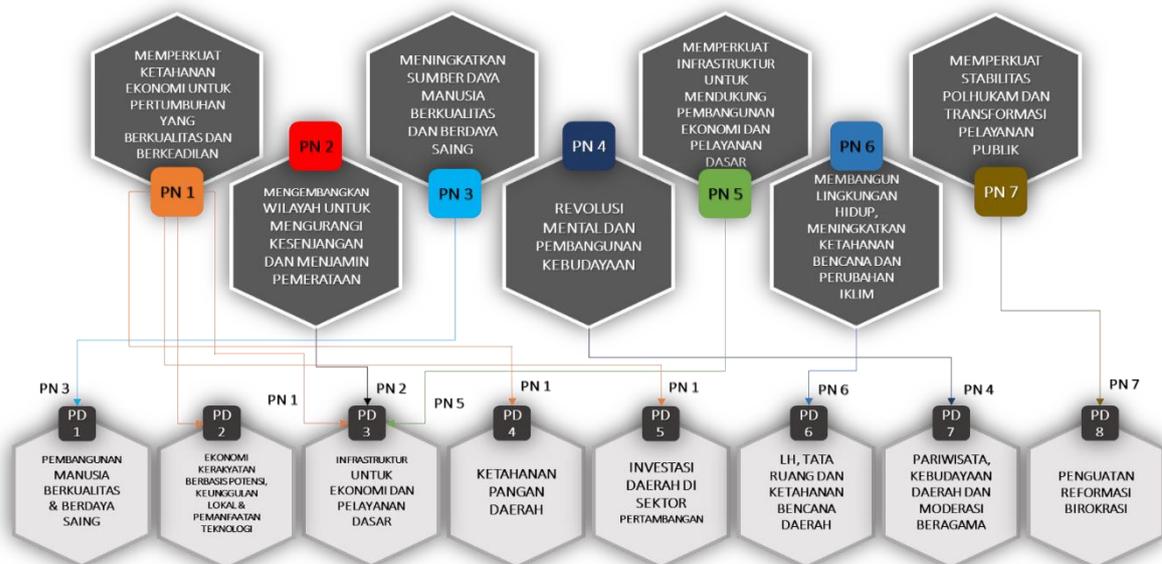
No	Prioritas Pembangunan Tahun 2022		
	Nasional	Sulteng	Banggai
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 5 : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Unggulan Prioritas 6 : Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 7 : Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Prioritas 2 : Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal & Pemanfaatan Teknologi Prioritas 3 : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar Prioritas 4 : Ketahanan Pangan Daerah Prioritas 5 : Investasi Daerah di Sektor Pertambangan Prioritas 7 : Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama
2.	Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 6 : Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 7 : Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Prioritas 3 : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas 1 : Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Prioritas 2 : Desentralisasi Layanan Kesehatan secara Merata Prioritas 3 : Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prioritas 1 : Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas 1 : Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan	Prioritas 7 : Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2022		
	Nasional	Sulteng	Banggai
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas 7 : Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Prioritas 3 : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 7 : Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Prioritas 6 : Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4 : Digitalisasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Prioritas 8 : Penguatan Reformasi Birokrasi

Secara diagramatis, sinkronisasi antara Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai tahun 2022 sebagaimana di sajikan dalam gambar 4.12 berikut :

Gambar 4.4

Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022



Setiap prioritas daerah di tetapkan sasaran yang akan di wujudkan. Sasaran di maksud bersesuaian dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026, sekaligus merupakan Sasaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022. Adapun sasaran daerah berdasarkan masing-masing prioritas daerah, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3
Sasaran, Indikator dan Perubahan Target Prioritas Daerah
Kab. Banggai Tahun 2022

No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Perubahan Target
1.	Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
	a. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar	1. Rata- Rata Lama Sekolah	Tahun	8,62	8,62
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,30	13,30
		3. Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	89,51	89,51
	b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,99	70,99
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	16,83	16,83
		Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	78,72	78,72
	c. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,83	90,83
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	45,3	45,3
		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	50,03	50,03
		Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Kategori	Rendah	rendah
	d. Meningkatnya Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,87	68,87
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,34	2,30 - 2,34
	e. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1. Angka Kemiskinan	%	6,70	6,0 – 6,70
		2. Gini Rasio	Point	0,297	0,97 – 0,31

No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Perubahan Target
	Kabupaten Banggai	3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	71,69	71,69 – 71,93
	f. Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olah Raga	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	40,31	40,31
		Indeks Pembangunan Olah Raga	Indeks	0,1	0,1
2.	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal & Pemanfaatan Teknologi				
	a. Meningkatkan Kualitas Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru.	% Koperasi Aktif dan Berkualitas/modern	%	77,096	77,096
		% UMKM Naik Kelas/Go Digital	%	83,48	83,48
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	7,5	7,5
	b. Meningkatkan Perekonomian Desa Melalui Pemberdayaan BUMDes	% BUMDes Sehat	%	48,90	48,90
		Skor Ketahanan Ekonomi Desa (Berdasarkan IDM)	%	0,5767	0,5767
	c. Meningkatkan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,23	3,23 – 3,96
		Inflasi Daerah	%	2,08	2,08
3.	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
	a. Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan	1. % Rumah Tangga dengan akses air minum layak dan aman	%	86,26	86,26
		2. % Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	%	77,46	77,46
		3. % Rumah Tangga dengan Akses rumah layak huni	%	86,19	86,19
	b. Tersediannya Infrastruktur Wilayah Untuk Mendukung Aktivitas	1. % Luas sawah beririgasi	%	85	85
		2. % Kondisi jalan mantap Kabupaten	%	99,53	99,53

No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Perubahan Target
	Perekonomian dan Konektivitas Wilayah yang berkualitas dan Merata	3. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan sektor transportasi	Indeks	0,351	0,351
		4. % Desa yang telah memiliki akses terhadap jaringan internet	%	43	43
4.	Ketahanan Pangan Daerah				
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	82,8	82,8
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	%	2,18	2,18
		Nilai Tukar Petani	Nilai		
		Nilai Tukar Nelayan	Nilai		
5.	Investasi Daerah di Sektor Pertambangan				
	Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	Pertumbuhan sektor pertambangan dan Penggalan dalam PDRB	%	2,42	2,42
		Nilai Investasi Pertambangan Milik Daerah	Nilai		
6.	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah				
	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,418	80,418
		Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Nilai		
		% Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	70	70
	Menurunkan Resiko Bencana di Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	kategori	Rendah	Rendah
7.	Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama				
	Meningkatnya Pariwisata Daerah	% Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	2,37	2,37

No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Perubahan Target
	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Babasalan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	48,11	48,11
	Meningkatnya Moderasi Beragama Masyarakat Kabupaten Banggai	Indeks Moderasi beragama	Indeks	65	65
8.	Penguatan Reformasi Birokrasi				
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kategori	B	B
	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan Daerah	Opini BPK	WTP/WDP	WTP	WTP
		Indeks Perencanaan Pembangunan	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik
		Nilai LPPD	Predikat	Baik	Baik
		Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3
		Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3
		Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa	Indeks		
		Nilai SAKIP	Predikat	A	A
	Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur	Nilai Kematangan Organisasi	Nilai		
		Indeks Sistem Merit	Indeks	Baik	Baik

Tabel 4.4
Persandingan Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai Tahun 2022

No	Indikator Ekonomi	Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional 2022	Perubahan Sasaran Pembangunan Sulteng 2022	Perubahan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai 2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)		9,50 – 11, 70	3,23 – 3,96
2.	Pengangguran (%)		3,07 – 3,67	2,34 - 2,30
3.	Kemiskinan (%)		11,0 – 12,18	6,70 - 6,0
4.	Indeks Gini (Poin)		0,240 – 0,326	0,31 - 0,297
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			71,69 – 71,93

No	Indikator Ekonomi	Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional 2022	Perubahan Sasaran Pembangunan Sulteng 2022	Perubahan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai 2022
6.	Inflasi (%)		1,92 – 3,24	2,08

Perubahan Sasaran dan target prioritas daerah sebagaimana tabel di atas berkonsekuensi terhadap target program dan kegiatan prioritas di setiap perangkat daerah. Penyesuaian Target program dan kegiatan berdasarkan kewenangan di maksud di sajikan pada lampiran program dan kegiatan per perangkat daerah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Perubahan Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2022

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dan target pada RKPD Tahun 2022, serta memperhatikan dan mempertimbangkan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih periode 2021– 2026 sesuai Visi dan Misinya, maka diperlukan perubahan kegiatan, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1. Pergeseran Anggaran Tahun 2022

Pergeseran anggaran tahun 2022 yang dilakukan mendahului perubahan APBD adalah Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya. Sedangkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja tidak dapat dilakukan mendahului perubahan APBD. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Banggai Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan untuk Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang mendasari

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor: 900/52/BPKAD-G.ST/2022, tanggal 16 Februari 2022
tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dan PMK Nomor
2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau
menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2022, yang mengakibatkan terjadinya perubahan antara lain :

- 1) Pendapatan Asli Daerah semula sebesar
Rp.299.653.834.452,00 berubah menjadi
Rp.244.933.053.956,00 atau berkurang sebesar
Rp.53.720.780.496,00 pengurangan terjadi pada pendapatan
pajak daerah sebesar Rp.41.766.291.345,00 dan Pendapatan
Retriusi Daerah sebesar Rp.26.442.947.049,00.
- 2) Pendapatan transfer sebelumnya sebesar
Rp.1.945.682.715.566,00 berubah menjadi
Rp.1.987.690.608.565 atau bertambah sebesar
Rp.42.007.892.999,00 Penambahan terjadi pada Pendapatan
Transfer – Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.
17.103.971.445,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah
sebesar Rp.24.903.921.554,00.
- 3) Belanja Daerah semula sebesar Rp.2.317.589.895.132,00
berubah menjadi Rp.2.501.758.902.107,00 atau bertambah
sebesar Rp.184.169.006.975,00. Belanja Daerah kemudian di
alokasikan sesuai peruntukan dalam keputusan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor: 900/52/BPKAD-G.ST/2022 dan PMK
Nomor 2/PMK.07/2022.

2. Penambahan, Penghapusan dan Pengurangan Kegiatan Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana kegiatan di
dalam RKPD Tahun 2022, baik judul kegiatan, capaian dan target

indikator, pagu indikatif serta lokasi kegiatan masih terdapat ketidakselarasan antara RKPD 2022 dengan APBD 2022. Berkenaan hal tersebut, serta berdasarkan pergeseran anggaran mendahului perubahan sebagaimana di atas, maka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan RKPD 2022 terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan baik penambahan anggaran, penambahan kegiatan, penghapusan kegiatan dan pengurangan anggaran, sebagaimana di sajikan pada table 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Organisasi Perangkat Daerah/Perangkat Daerah
yang Melakukan Penambahan, Pengurangan dan Penghapusan Kegiatan Tahun 2022

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	TAMBAH/ KURANG
A	Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
1	URUSAN PENDIDIKAN												
	Dinas Pendidikan	6	6	6	0	18	18	18	0	149	149	149	0
2	URUSAN KESEHATAN												
	Dinas Kesehatan	5	5	5	0	19	19	19	0	84	84	84	0
	RSUD Luwuk	2	2	2	0	6	6	6	0	6	6	6	0
3	URUSAN PEKERJAAAN UMUM												
	PUPR	11	11	11	0	25	25	25	0	78	78	78	0
4.	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	4	4	4	0	14	14	14	0	45	45	45	0
5.	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
	Sat Pol Pp Dan Damkar	2	2	2	0	4	4	4	0	14	14	14	0
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	0	4	4	4	0	11	11	11	0
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
	DInas Sosial	6	6	6	0	14	14	14	0	43	43	43	0
B	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
6.	URUSAN TENAGA KERJA												

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	TAMBAH/ KURANG
	Dinas Tenaga Kerja	4	4	4	0	15	15	15	0	41	41	41	0
7.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK												
	DP2KBP3A	5	5	5	0	14	14	14	0	30	30	30	0
8.	URUSAN PANGAN												
	Dinas Ketahanan Pangan	5	5	5	0	15	15	15	0	48	48	48	0
9.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP												
	Dinas Lingkungan Hidup	14	14	14	0	23	23	23	0	49	49	49	0
10.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & CAPIL												
	Dinas kependudukan dan Capil	5	5	5	0	17	17	17	0	50	50	50	0
11.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5	0	11	11	11	0	42	42	42	0
12.	URUSAN PERHUBUNGAN												
	Dinas Perhubungan	3	3	3	0	22	22	19	0	49	49	49	0
13.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	3	3	0	11	11	11	0	55	55	55	0
14.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												
	Dinas Koperasi dan UKM	8	8	8	0	15	15	15	0	40	40	40	0
15.	URUSAN PENANAMAN MODAL												
	DPMPTSP	6	6	6	0	13	13	13	0	40	40	40	0

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	TAMBAH/ KURANG
16.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA												
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3	3	3	0	15	15	15	0	40	40	40	0
17.	URUSAN PERPUSTAKAAN												
	Dinas Perpustakaan	1	1	1	0	8	8	8	0	28	28	28	0
C	URUSAN PILIHAN												
18.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN												
	Dinas Perikanan	4	4	4	0	16	16	16	0	43	43	43	0
19.	URUSAN PARIWISATA												
	Dinas Pariwisata	5	5	5	0	8	8	8	0	64	64	64	0
20.	URUSAN PERTANIAN												
	Dinas TPHP	5	5	5	0	11	11	11	0	40	40	40	0
	Dinas Peternakan	6	6	6	0	20	20	20	0	46	46	46	0
21.	URUSAN PERDAGANGAN												
	Dinas Perdagangan	7	7	7	0	20	20	20	0	48	48	48	0
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
	Sekretariat Daerah	3	3	3	0	20	20	20	0	69	69	69	0
	Sekretariat DPRD	2	2	2	0	17	17	17	0	72	72	72	0
E	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
	PERENCANAAN												
	Bappedalitbang	4	4	4	0	17	17	17	0	64	64	64	0
	KEUANGAN												
	BPKAD	1	1	1	0	5	5	5	0	34	34	34	0
	Badan Pendapatan	3	3	3	0	10	10	10	0	50	50	50	
	KEPEGAWAIAN												
	BKPSDM	3	3	3	0	13	13	13	0	54	54	54	0

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2022	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	TAMBAH/ KURANG
F.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
	Inspektorat Daerah	3	3	3	0	10	10	10	0	40	40	40	0
G.	UNSUR KEWILAYAHAN												
	Kecamatan	82	82	82	0	210	210	210	0	476	476	476	0
H.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	1	0	7	7	7	0	26	26	26	0
	JUMLAH	221	221	221	0	653	653	653	0	1936	1936	1936	0

5.2 Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2022

Perubahan Kerangka Pendanaan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022 adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Perubahan Kerangka Pendanaan
RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022

Kode Akun	Uraian	APBD Tahun 2022	Perubahan RKPD 2022	Bertambah/ Berkurang
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.259.156.091.278,00	2.247.443.203.781,00	(11.712.887.497)
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	299.653.834.452,00	245.933.053.956,00	(53.720.780.496)
4 1 01	Pendapatan Pajak Daerah	134.176.713.345,00	92.410.422.000,00	(41.766.291.345)
4 1 02	Hasil Retribusi Daerah	46.486.034.900,00	20.043.087.851,00	(26.442.947.049)
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.391.086.207,00	130.879.544.105,00	14.488.457.898
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.945.682.715.566,00	1.987.690.608.565,00	42.007.892.999
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.892.531.367.568,00	1.909.635.339.013,00	17.103.971.445
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.151.347.998,00	78.055.269.552,00	24.903.921.554
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.819.541.260,00	13.819.541.260,00	0
4 3 01	Pendapatan Hibah	13.819.541.260,00	13.819.541.260,00	0
4 3 03	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
5	BELANJA	2.317.589.895.132,00	2.501.758.902.107,00	184.169.006.975
5 1	BELANJA OPERASI	1.627.489.093.049,00	1.770.766.763.496,00	143.277.670.447
5 1 01	Belanja Pegawai	847.497.221.925,00	910.312.404.836,00	62.815.182.911
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	735.762.348.593,00	797.212.340.491,00	61.449.991.898
5 1 04	Belanja Subsidi	404.000.000,00	404.000.000,00	0
5 1 05	Belanja Hibah	43.185.522.531,00	53.949.208.169,00	10.763.685.638
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	640.000.000,00	8.888.810.000,00	8.248.810.000
5 2	BELANJA MODAL	335.177.125.579,00	346.147.936.747,00	10.970.811.168
5 2 01	Belanja Tanah	300.000.000,00	300.000.000,00	0

Kode Akun	Uraian	APBD Tahun 2022	Perubahan RKPD 2022	Bertambah/ Berkurang
5 2 02	Belanja Peralatan & Mesin	67.092.601.431,00	70.928.502.768,00	3.835.901.337
5 2 03	Belanja Gedung & Bangunan	123.137.121.452,00	126.559.525.505,00	3.422.404.053
5 2 04	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	142.524.902.696,00	146.507.908.474,00	3.983.005.778
5 2 05	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.122.500.000,00	1.852.000.000,00	(270.500.000)
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	3.000.000.000,00	32.920.525.360,00	29.920.525.360
5.3. 01	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	32.920.525.360,00	29.920.525.360
5.4	BELANJA TRANSFER	351.923.676.504,00	351.923.676.504,00	0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.066.274.824,00	18.066.274.824,00	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	333.857.401.680,00	333.857.401.680,00	0
	SURPLUS/DEFISIT	(58.433.803.854,00)	(254.315.698.326,00)	(195.881.894.472)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	58.433.803.854,00	254.315.698.326,00	195.881.894.472
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	61.433.803.854,00	257.315.698.326,00	195.881.894.472
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.433.803.854,00	256.315.698.326,00	195.881.894.472
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0
6 2 02	Penyertaan Modal (Investasi) pemda	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0

Mendasari perubahan kerangka pendanaan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022 sebagaimana di atas, maka di rumuskan pagu indikatif per Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4
Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah

No.	URUSAN/PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			PAGU INDIKATIF TAHUN 2022
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	DINAS PENDIDIKAN	6	18	149	506,879,915,075,00
2	DINAS KESEHATAN	5	19	84	292,682,706,450,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	2	6	6	192.701.457.572
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	25	78	307,036,939,156

No.	URUSAN/PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			PAGU INDIKATIF TAHUN 2022
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4	14	45	22.975.366.150
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2	4	14	18.792.388.463
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	4	11	7.360.515.773
8.	DINAS SOSIAL	6	16	43	17.385.865.084
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	15	41	9.393.438.914
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	14	30	17.071.065.162
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	15	48	13.383.236.430
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14	23	49	30.659.938.690
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	17	50	10.328.039.202
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	11	42	31.177.223.238
15	DINAS PERHUBUNGAN	3	19	43	21.624.197.089
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	11	55	9.440.761.363
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8	15	40	9.290.604.622
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	13	38	8.305.134.186
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	3	15	40	33.640.037.995
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2	8	28	7.415.424.140
21	DINAS PERIKANAN	4	16	43	15.919.176.776
22	DINAS PARIWISATA	5	8	64	11.069.367.223
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6	20	46	26.215.232.661

No.	URUSAN/PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			PAGU INDIKATIF TAHUN 2022
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
24	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	5	11	40	79.644.923.164
25	DINAS PERDAGANGAN	7	19	46	14.215.155.302
26	SEKRETARIAT DAERAH	3	20	69	105.936.992.019
27	SEKRETARIAT DPRD	2	17	72	70.473.415.996
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	17	64	18.889.253.288
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	5	34	421.790.993.572
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3	9	48	20.513.588.433
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	13	54	13.276.339.960
32	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	40	14.991.993.341
33	KECAMATAN NUHON	2	2	4	3.347.043.381
34	KECAMATAN BUNTA	2	3	6	6.015.742.737
35	KECAMATAN PAGIMANA	2	3	6	7.393.460.211
36	KECAMATAN BUALEMO	3	3	4	3.785.855.151
37	KECAMATAN BALANTAK	2	2	5	5.580.061.327
38	KECAMATAN LAMALA	2	2	3	3.588.834.232
39	KECAMATAN MASAMA	3	3	4	2.664.530.223
40	KECAMATAN LUWUK TIMUR	2	2	3	3.205.326.818
41	KECAMATAN LUWUK	3	3	6	12.520.213.634
42	KECAMATAN KINTOM	3	3	6	6.428.166.618
43	KECAMATAN BATUI	4	5	8	8.078.261.535
44	KECAMATAN TOILI	3	4	8	4.428.489.387
45	KECAMATAN TOILI BARAT	2	2	3	3.564.612.630

No.	URUSAN/PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			PAGU INDIKATIF TAHUN 2022
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
46	KECAMATAN SIMPANG RAYA	3	3	4	2.659.949.917
47	KECAMATAN LOBU	3	3	4	2.593.914.111
48	KECAMATAN MOILONG	5	5	8	2.432.744.527
49	KECAMATAN BATUI SELATAN	4	4	11	2.726.084.372
50	KECAMATAN BALANTAK SELATAN	3	3	4	2.642.665.132
51	KECAMATAN NAMBO	2	3	5	7.480.811.115
52	KECAMATAN LUWUK SELATAN	3	3	6	11.276.156.130
53	KECAMATAN LUWUK UTARA	3	4	6	5.380.360.039
54	KECAMATAN BALANTAK UTARA	3	3	4	2.299.708.899
55	KECAMATAN MANTOH	3	3	4	2.610.346.854
56	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	7	26	8.574.876.638
TOTAL		221	653	1936	2.501.758.902.107,00

Rincian Program, Kegiatan dan sub kegiatan masing – masing Perangkat Daerah di sajikan dalam lampiran Buku Perubahan RKPD ini. Daftar di maksud merupakan hasil print out dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2022 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana kerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022.

Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022.